

SUKU BUNGA, INFLASI DAN 'HIGH COST ECONOMY'

Siwi Nugraheni¹

PENDAHULUAN

Pendapat Menristek Habibie tentang tingginya suku bunga bank di Indonesia yang dilontarkan beberapa waktu yang lalu mendapat tanggapan yang cukup 'meriah' dari kalangan ahli ekonomi. Tak kurang dari pakar ekonomi senior seperti Prof. Soemitro Djohadikusumo ikut pula memberikan tanggapan atas pendapat Habibie tersebut. Menurut Habibie, tingginya suku bunga akan menyebabkan harga-harga umum cenderung mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Sedangkan para ekonom berpendapat sebaliknya, tingginya suku bunga bank adalah akibat dari adanya inflasi. Mengutip pendapat Nopirin dan Miranda Gultom dalam *Kompas* (1996b), justru dengan menaikkan suku bunga maka inflasi dapat ditekan. Tulisan di bawah ini tidak hendak membela salah satu 'kubu' dalam debat suku bunga tersebut, melainkan akan mencoba menjelaskan mengapa kedua pendapat tersebut sebenarnya sama benarnya, disamping menyoroti perlunya perbaikan-perbaikan di sektor riil yang justru secara signifikan akan mampu memperbaiki kinerja suku bunga dan tingkat harga.

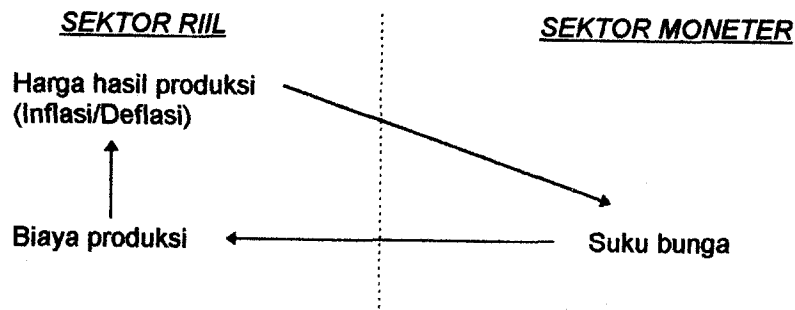
SUKU BUNGA DAN INFLASI: MANA LEBIH DULU?

Pendapat Habibie mengenai tingginya suku bunga didasarkan pada keprihatinannya atas biaya bunga yang harus dipikul oleh para usahawan atau investor. Masuk akal, sebab makin tinggi suku bunga berarti akan makin besar pula biaya atas modal, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya produksi. Semakin mahal ongkos produksi maka akan makin tinggi pula harga output. Dengan demikian, tingginya suku bunga akan dapat memicu terjadinya kenaikan harga, atau inflasi. Ini bila dilihat bahwa bunga bank merupakan salah satu komponen biaya produksi. Itulah sebabnya Habibie menyarankan otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga.

Di sisi lain, para pakar ekonomi berpendapat bahwa tinggi rendahnya suku bunga adalah akibat dari suatu kebijakan ekonomi makro yang bertujuan antara lain untuk memelihara stabilitas harga. Bila dirasakan laju inflasi terlalu cepat, maka Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, atau otoritas moneter, akan melakukan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan dengan jalan mengurangi jumlah pasokan uang, sehingga 'nilai' uang, relatif dibandingkan dengan barang dan jasa, akan membaik. Inflasi disebabkan oleh 'terlalu banyaknya' jumlah uang yang beredar, relatif dibandingkan dengan peredaran barang dan jasa di sektor riil. Jika laju kenaikan uang beredar di sektor moneter lebih cepat dibandingkan dengan laju kenaikan hasil produksi, maka akan terjadi inflasi. Sehingga instrumen untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan uang ketat. Kebijakan ini memiliki akibat sampingan yaitu kenaikan suku bunga. Jika jumlah uang beredar berkurang akibat kebijakan yang kontraktif ini, maka 'harga' uang, dalam hal ini suku bunga, akan naik. Sehingga menurut pendapat ini, suku bunga yang tinggi merupakan efek samping dari kebijakan pengetatan uang untuk mengobati inflasi. Dalam keadaan inflasi tinggi, rendahnya suku bunga justru dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri dalam jumlah makin besar, atau berubahnya posisi portfolio pemilik kekayaan, dari deposito di bank menjadi kekayaan non-uang, misalnya tanah.

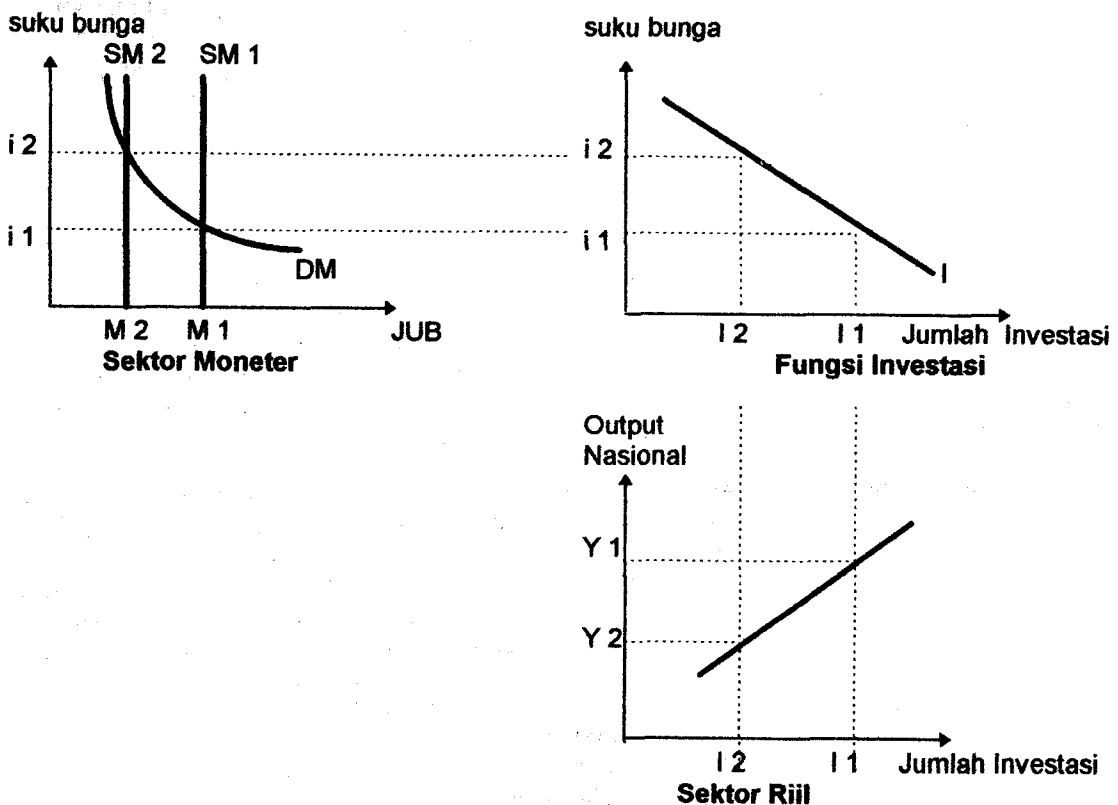
Sebenarnya hubungan antara suku bunga dan inflasi seperti yang dikemukakan oleh Habibie maupun pakar ekonomi seperti yang diuraikan di atas adalah sama benarnya. Tinggi rendahnya suku bunga memang dapat memicu inflasi, dan sebaliknya kebijakan untuk mengatasi inflasi akan mengakibatkan tingginya suku bunga. Keduanya berhubungan sebagai sebab-akibat -seperti lingkaran setan-, saling berhubungan tapi tidak dapat dilihat mana ujung, mana pangkal. Seperti telur dan ayam, kata pepatah. Gambar 1 di bawah ini mengilustrasikan keadaan tersebut.

¹ Dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Katolik Parahyangan.



Gambar 1. Hubungan antara suku bunga dan tingkat harga

Ada dua sektor dalam perekonomian, sektor riil dan sektor moneter. Sektor moneter muncul sejak dipakainya uang sebagai alat tukar dalam transaksi. Suku bunga merupakan penghubung kedua sektor perekonomian tersebut. Bila keseimbangan yang terjadi di sektor moneter (permintaan uang sama dengan penawaran uang) menghasilkan 'harga uang' (yaitu suku bunga) yang tinggi, maka investasi di sektor riil akan turun. Bila investasi turun, maka output nasional akan turun pula, dan terjadilah inflasi, sebab laju kenaikan output yang diproduksi lebih rendah dibandingkan dengan laju kenaikan pasokan uang. Sehingga menurut mekanisme tersebut, untuk mengatasi inflasi dilaksanakanlah kebijakan yang mengurangi jumlah pasokan uang. Sebagai efek sampingnya adalah naiknya suku bunga. Instrumen suku bunga ini pula yang digunakan oleh otoritas moneter di Indonesia untuk meredam perekonomian Indonesia saat terjadi 'overheated' di tahun 1990, sehingga kemudian laju inflasi melambat (Prasetyantono, 1996). Mekanisme transmisi inilah yang lebih dikenal oleh kalangan ekonom. Gambar 2 menguraikan mekanisme transmisi yang dimaksud.



Gambar 2. Mekanisme transmisi kebijakan moneter kontraktif (sumber: Samuelson 1996H.518)

Pada Gambar 2, ada tiga grafik yang saling berhubungan. Grafik yang pertama menggambarkan keadaan di sektor moneter. Grafik tersebut menghubungkan variabel suku bunga dengan variabel jumlah uang yang beredar (JUB). SM mencerminkan penawaran uang, yang sifatnya ditentukan oleh pemerintah, sehingga tetap jumlahnya, atau dianggap sebagai variabel yang *given*, artinya naik dan turunnya suku bunga tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang ditawarkan. Sedangkan DM adalah permintaan uang. Semakin tinggi suku bunga, berarti menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai akan lebih merugikan dibandingkan dengan non-uang tunai. Ini menyebabkan kurva DM memiliki kemiringan negatif. Grafik kedua yang terletak tepat di sebelah kanan grafik pertama mencerminkan keadaan permintaan investasi. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi suku bunga maka orang akan semakin enggan untuk melakukan investasi. Oleh karenanya, hubungan antara suku bunga dan besarnya investasi adalah negatif. Grafik yang terakhir menggambarkan kondisi di sektor riil, menghubungkan variabel investasi dengan output nasional. Sebagai salah satu komponen permintaan agregat, bila investasi turun maka permintaan agregat juga akan menurun. Sehingga output nasionalpun akan menjadi lebih rendah.

Bila perekonomian mula-mula berada pada kondisi Y_1 , dengan tingkat harga tertentu misalnya P_1 , maka di sektor moneter keadaan ini dicerminkan oleh perpotongan antara SM_1 dan DM . Misalnya pemerintah menganggap bahwa P_1 ini terlalu tinggi (inflasi), dan ingin menurunkannya, maka cara yang ditempuh adalah menurunkan pasokan uang dari SM_1 menjadi SM_2 . Perpotongan antara SM_2 dan DM memberikan nilai suku bunga sebesar i_2 , yang lebih tinggi dari suku bunga semula (i_1). Penghubung antara sektor moneter dan sektor riil adalah grafik yang kedua, yakni grafik permintaan investasi. Karena suku bunga mengalami kenaikan, sebagai akibatnya jumlah investasi akan turun (dari I_1 ke I_2).

Dalam mekanisme transmisi yang diperlihatkan oleh Gambar 2 tersebut tidak terlihat adanya perubahan harga. Artinya, naik dan turunnya harga dianggap sebagai faktor eksogen. Ekonom membahas secara tersendiri mengenai penyebab terjadinya inflasi ini, yakni *cost-push* dan *demand-pull*. Yang pertama berkaitan dengan adanya kenaikan biaya produksi, yang akan menurunkan penawaran, sehingga dengan pola permintaan yang tetap akan mengakibatkan harga naik. Inflasi karena *cost-push* inilah yang sejalan dengan pemikiran Habibie. Sedangkan *demand-pull inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan. Berkaitan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sritua Arief menyimpulkan bahwa faktor yang paling signifikan menyumbang terjadinya inflasi adalah proses pembentukan harga dalam pasar yang tidak efisien, akibat struktur pasar yang tidak sempurna (Arief, 1997). Masalah ketidakefisienan sektor riil itulah yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut ini.

'HIGH COST ECONOMY'

Gambar 1 menggambarkan adanya lingkaran setan yang tidak berujung pangkal antara suku bunga dan inflasi. Bila terjadi inflasi, maka suku bunga naik, dan suku bunga yang tinggi memicu terjadinya inflasi. Sama seperti kisah lingkaran setan yang lain, untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara memutus siklusnya. Ibarat memutus siklus hidup nyamuk, secara teori pemutusan tersebut dapat dimulai dari rantai manapun. Tentu saja harus dipilih yang paling mudah dilakukan, dengan resiko yang seminimal mungkin.

Telah disebutkan di atas bahwa keberatan Habibie atas tingginya suku bunga adalah berdasarkan alasan tingginya beban biaya yang harus dipikul oleh pengusaha. Itulah sebabnya dia menyarankan otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga. Meskipun studi yang dilakukan oleh Hartojo Wignjowijoto memperlihatkan bahwa pengaruh suku bunga terhadap inflasi di Indonesia kecil sekali, atau tidak signifikan (Wignjowijoto, 1996a). Lagipula, bila otoritas moneter menurunkan suku bunga, justru dikhawatirkan akan terjadi pelarian modal ke luar negeri. Kalaupun bank-bank komersial memaksakan diri untuk menurunkan suku bunga, sudah dapat dipastikan mereka akan bertindak secara diskriminatif. Bank-bank akan menetapkan suku bunga yang lebih rendah bagi pemilik modal kecil, yang posisi tawarnya rendah, sedangkan bagi nasabah dengan simpanan yang signifikan besarnya akan diperlakukan dengan lebih baik, yakni dengan memberikan bunga dengan tingkat yang lebih tinggi. Ini untuk mencegah pemilik modal besar tersebut menarik simpanannya dari bank.

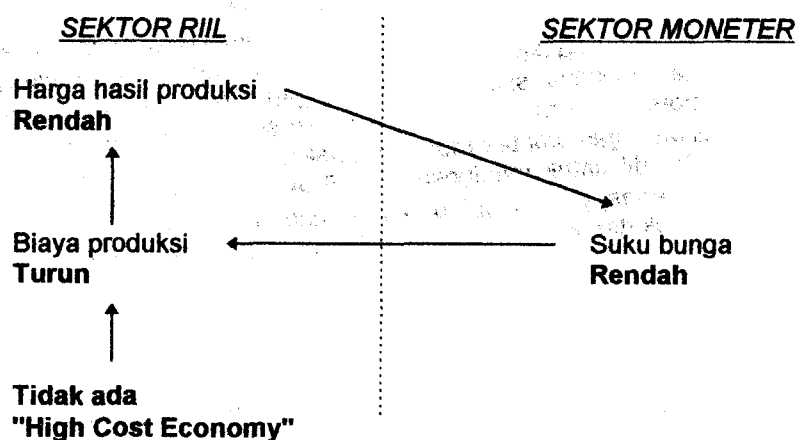
Tentu tindakan ini akan berdampak kurang menguntungkan dalam konteks redistribusi pendapatan, sebab dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi makin lebar.

Di sisi lain, bila ditilik lebih dalam lagi, sebenarnya beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh kalangan bisnis ini terdiri dari banyak komponen. Selain biaya bahan baku, biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya bunga, juga biaya-biaya lain termasuk sederet pungutan-pungutan, baik yang resmi maupun yang tidak.

Penurunan harga output dapat dilakukan dengan menurunkan salah satu atau lebih komponen biaya produksi. Biaya bunga hanya salah satunya. Dengan kata lain, penurunan biaya produksi masih dapat diupayakan dengan menurunkan biaya-biaya yang lain. Diantara sederet biaya tersebut, banyak biaya yang masih dapat ditekan, tanpa berdampak mengurangi jumlah output perusahaan. Biaya pungutan misalnya. Jenis biaya ini paling potensial menjadi pilihan untuk ditekan seminimal mungkin, bahkan bila mungkin ditiadakan sama sekali, terutama bila pungutan tersebut tidak resmi, alias pungutan liar (pungli). Paling tidak ada dua alasan utama. Pertama, pengurangan biaya tersebut tidak atau kecil sekali pengaruhnya terhadap proses produksi, artinya dengan menguranginya maka jumlah maupun kualitas output tidak akan berubah. Bahkan menurut studi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan (1997) ada banyak pungutan yang bila dihapus tidak akan mengurangi pendapatan pemerintah daerah.

Alasan kedua untuk menghapus pungutan adalah komponen karena biaya pungutan ini ternyata menyumbang sangat besar pada total biaya produksi, sehingga terjadi *high cost economy*, ekonomi biaya tinggi. Dalam kaitan dengan sikap pelaku bisnis yang enggan menaikkan upah pekerjanya sesuai dengan aturan UMR yang baru beberapa waktu yang lalu terungkap bahwa besarnya pungutan (baik resmi maupun tak resmi) dapat mencapai sekitar 40%, bahkan lebih, dari total biaya produksi. Dalam skala makro, hilangnya pungutan berarti dapat menyelamatkan kebocoran pembangunan yang oleh Prof. Soemitro diperkirakan sebesar 30%. Suatu jumlah yang sangat besar untuk skala perekonomian suatu negara.

Berkurangnya biaya produksi dengan sendirinya akan meningkatkan efisiensi sektor riil. Artinya, dengan biaya yang sama dapat dihasilkan lebih banyak output, atau untuk menghasilkan sejumlah output yang sama dibutuhkan biaya yang lebih rendah. Bila efisiensi sektor riil meningkat, maka harga-harga output dapat ditekan, dan pada gilirannya akan menahan laju inflasi. Terkendalnya harga tidak akan memaksa otoritas moneter untuk melakukan kebijakan uang ketat yang dapat menimbulkan dampak naiknya suku bunga. Bila suku bunga relatif rendah maka biaya yang ditanggung para pengusaha akan lebih rendah, yang pada akhirnya akan mampu menghasilkan output dengan harga yang relatif rendah, sehingga tidak terjadi inflasi. Demikian seterusnya, sehingga gambar 1 tersebut di atas akan berubah menjadi 'lingkaran malaikat' seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Hubungan antara suku bunga, 'high cost economy' dan tingkat harga

Rendahnya efisiensi sektor riil tidak hanya bersumber pada tingginya biaya pungutan seperti telah dibahas di atas, tetapi dapat juga disebabkan oleh distorsi ekonomi yang lain, misalnya adanya monopoli. Perusahaan monopoli akan cenderung menetapkan harga di atas harga 'wajar'. Dalam proses produksinya perusahaan monopoli juga cenderung tidak efisien. Bila kebetulan output yang dihasilkan oleh pengusaha monopolis tersebut digunakan dalam proses produksi berikutnya, maka sudah pasti industri hilirnya akan menanggung biaya yang tinggi, yang akan memaksanya untuk menjual produknya dengan harga yang mahal pula. Sehingga menciptakan suasana persaingan dalam industri akan memacu perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi mereka dan pada akhirnya dapat menghasilkan harga output yang lebih rendah.

PENUTUP

Dalam debat yang menyoroti masalah tingginya suku bunga dan inflasi, dapat dicari alternatif lain yang lebih 'aman' untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih ideal yakni suku bunga dan inflasi yang sama-sama rendah. Peningkatan efisiensi sektor riil melalui pemangkasan pungutan-pungutan yang tidak perlu dapat menghindarkan jebakan 'high cost economy'. Distorsi-distorsi dalam pasar, seperti terbentuknya monopoli dalam industri, juga menyumbang pada rendahnya efisiensi sektor riil. Semua itu hanya akan mengakibatkan kenaikan harga output yang pada gilirannya akan memacu terjadinya inflasi dan naiknya suku bunga. Dengan demikian, menghilangkan sumber ekonomi biaya tinggi dan distorsi ekonomi lainnya merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Tentu saja ini bukan merupakan tugas otoritas moneter belaka, tetapi tugas semua pelaku ekonomi. Pembinaan di efisiensi sektor riil untuk meningkatkan efisiensinya tidak dapat ditawar lagi lebih-lebih bila kita bicara era pasar bebas, yang sudah di depan mata. Pasar bebas menuntut peningkatan daya saing produk domestik untuk dapat bertahan baik di pasar dalam negeri maupun pasar dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1996a. "Konsultan Bank Bank Dunia Dr. Hartoyo Wignjowijoto: Mustahil Turunkan Suku Bunga", *Kompas*, 4 November:2.
- , 1996b. "Suku Bunga Tinggi Malah Redam Inflasi", *Kompas*, 11 Oktober:2.
- , 1997. "Ekonomi Biaya Tinggi Versi Kadin: Jangankan Pengusaha, Orang Matipun Kena Pungutan", *Kompas*, 27 Februari: 17
- Arief, S., 1997. "Tanggapan atas Analisa Ross McLeod: Tidak Luar Biasa, Walau Tidak Sepenuhnya Pro BI", *Kompas*, 7 Februari:17.
- Prasetyantono, T., 1996. "Inflasi vs Suku Bunga", *Kompas*, 31 Oktober:4.
- Samuelson, P.A. dan Nordhaus, W.D., 1995. *Economics*, McGraw-Hill, New York.